



PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pengawasan obat dan makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu diubah;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

- Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 610);
  5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Jumlah UPT BPOM terdiri atas:
  - a. 26 (dua puluh enam) Balai Besar POM;
  - b. 37 (tiga puluh tujuh) Balai POM; dan
  - c. 20 (dua puluh) Loka POM.
- (2) Nomenklatur, klasifikasi, provinsi, lokasi, dan wilayah kerja UPT BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
  - a. seluruh unsur organisasi di lingkungan UPT BPOM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi unit pelaksana teknis BPOM berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini;
  - b. seluruh jabatan yang ada dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT BPOM berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan ketentuan Peraturan Badan ini;
  - c. program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum Peraturan Badan ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya program dan kegiatan yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan ini; dan
  - d. semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

2. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMENKLATUR, KLASIFIKASI, PROVINSI, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Besar POM di Banda Aceh	Balai Besar	Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang
2.	Balai POM di Aceh Tengah	Balai		Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Nagan Raya
3.	Loka POM di Kota Subulussalam	Loka		Kota Subulussalam	Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Kabupaten Simeulue
4.	Balai Besar POM di Medan	Balai Besar	Sumatera Utara	Kota Medan	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Pematang Siantar, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Batu Bara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Simalungun

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
5.	Balai POM di Tanjungbalai	Balai		Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara
6.	Balai POM di Toba	Balai		Kabupaten Toba	Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga
7.	Loka POM di Kota Gunungsitoli	Loka		Kota Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kabupaten Nias Barat
8.	Balai Besar POM di Padang	Balai Besar	Sumatera Barat	Kota Padang	Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok
9.	Balai POM di Payakumbuh	Balai		Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar
10.	Balai POM di Sijunjung	Balai		Kabupaten Sijunjung	Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, dan Kota Sawah Lunto
11.	Balai Besar POM di Pekanbaru	Balai Besar	Riau	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti
12.	Balai POM di Dumai	Balai		Kota Dumai	Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir
13.	Balai POM di Indragiri Hulu	Balai		Kabupaten Indragiri Hulu	Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kuantan Singingi
14.	Balai POM di Batam	Balai	Kepulauan Riau	Kota Batam	Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Anambas
15.	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	Loka		Kota Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
16.	Balai POM di Jambi	Balai	Jambi	Kota Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo
17.	Balai POM di Bungo	Balai		Kabupaten Bungo	Kabupaten Bungo, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin
18.	Balai POM di Bengkulu	Balai	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Tengah
19.	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Loka		Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Lebong
20.	Balai Besar POM di Palembang	Balai Besar	Sumatera Selatan	Kota Palembang	Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Prabumulih
21.	Balai POM di Lubuklinggau	Balai		Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Pagar Alam
22.	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Balai Besar	Lampung	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Barat
23.	Balai POM di Tulang Bawang	Balai		Kabupaten Tulang Bawang	Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, dan Kabupaten Lampung Utara



No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
24.	Balai Besar POM di Pangkal Pinang	Balai Besar	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah
25.	Balai POM di Belitung	Balai		Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur
26.	Balai Besar POM di Serang	Balai Besar	Banten	Kota Serang	Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang
27.	Balai POM di Tangerang	Balai		Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan
28.	Balai Besar POM di Jakarta	Balai Besar	Daerah Khusus Jakarta	Kota Jakarta	Kota Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Utara
29.	Balai Besar POM di Bandung	Balai Besar	Jawa Barat	Kota Bandung	Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kota Sukabumi
30.	Balai POM di Tasikmalaya	Balai		Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Banjar
31.	Balai POM di Bogor	Balai		Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok
32.	Loka POM di Kabupaten Karawang	Loka		Kabupaten Karawang	Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi
33.	Loka POM di Kabupaten Indramayu	Loka		Kabupaten Indramayu	Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cirebon
34.	Balai Besar POM di Semarang	Balai Besar	Jawa Tengah	Kota Semarang	Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kota Magelang, Kota Pekalongan, dan Kota Salatiga

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
35.	Balai POM di Banyumas	Balai		Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga
36.	Balai POM di Surakarta	Balai		Kota Surakarta	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Wonogiri
37.	Loka POM di Kabupaten Tegal	Loka		Kabupaten Tegal	Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kota Tegal
38.	Loka POM di Kabupaten Grobogan	Loka		Kabupaten Grobogan	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang
39.	Balai Besar POM di Yogyakarta	Balai Besar	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman
40.	Balai Besar POM di Surabaya	Balai Besar	Jawa Timur	Kota Surabaya	Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Malang, Kabupaten Lamongan, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Kota Probolinggo
41.	Balai POM di Kediri	Balai		Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung
42.	Balai POM di Jember	Balai		Kabupaten Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Lumajang
43.	Loka POM di Kabupaten Madiun	Loka		Kabupaten Madiun	Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Madiun
44.	Balai Besar POM di Denpasar	Balai Besar	Bali	Kota Denpasar	Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
45.	Balai POM di Buleleng	Balai		Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana
46.	Balai Besar POM di Mataram	Balai Besar	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara
47.	Balai POM di Bima	Balai		Kabupaten Bima	Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat
48.	Balai Besar POM di Kupang	Balai Besar	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Sikka
49.	Balai POM di Ende	Balai		Kabupaten Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada
50.	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Loka		Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur
51.	Loka POM di Kabupaten Belu	Loka		Kabupaten Belu	Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka
52.	Loka POM di Kabupaten Sumba Timur	Loka		Kabupaten Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Tengah
53.	Balai Besar POM di Pontianak	Balai Besar	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kayong Utara
54.	Balai POM di Sanggau	Balai		Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi
55.	Loka POM di Kabupaten Sambas	Loka		Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang
56.	Balai Besar POM di Palangka Raya	Balai Besar	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas,

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
					Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kotawaringin Timur
57.	Loka POM di Kotawaringin Barat	Loka		Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Sukamara
58.	Balai Besar POM di Banjarbaru	Balai Besar	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
59.	Balai POM di Tabalong	Balai		Kabupaten Tabalong	Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
60.	Balai POM di Tanah Bumbu	Balai		Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kota Baru
61.	Balai Besar POM di Samarinda	Balai Besar	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, dan Kabupaten Mahakam Ulu
62.	Balai POM di Balikpapan	Balai		Kota Balikpapan	Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajem Paser Utara
63.	Balai POM di Tarakan	Balai	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung
64.	Balai POM di Mamuju	Balai	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar
65.	Balai Besar POM di Makassar	Balai Besar	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jenepono, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, dan Kota Pare-Pare

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
66.	Balai POM di Palopo	Balai		Kota Palopo	Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Enrekang
67.	Loka POM di Kabupaten Bone	Loka		Kabupaten Bone	Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo
68.	Balai Besar POM di Palu	Balai Besar	Sulawesi Tengah	Kota Palu	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Morowali Utara
69.	Loka POM di Kabupaten Banggai	Loka		Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kabupaten Banggai Laut
70.	Balai Besar POM di Kendari	Balai Besar	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, dan Kabupaten Konawe Kepulauan
71.	Balai POM di Bau-Bau	Balai		Kota Bau-Bau	Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, dan Kabupaten Wakatobi
72.	Balai Besar POM di Manado	Balai Besar	Sulawesi Utara	Kota Manado	Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
73.	Balai POM di Kepulauan Sangihe	Balai		Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
74.	Balai Besar POM di Gorontalo	Balai Besar	Gorontalo	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato
75.	Balai POM di Ambon	Balai	Maluku	Kota Ambon	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Buru Selatan
76.	Loka POM di Kepulauan Tanimbar	Loka		Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya
77.	Balai POM di Sofifi	Balai	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, dan Kabupaten Pulau Taliabu
78.	Loka POM di Pulau Morotai	Loka		Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai dan Kabupaten Halmahera Utara
79.	Balai POM di Manokwari	Balai	Papua Barat	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Pegunungan Arfak
80.	Balai POM di Sorong	Balai	Papua Barat Daya	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Raja Ampat
81.	Balai Besar POM di Jayapura	Balai Besar	Papua	Kota Jayapura	Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Lanny Jaya

No.	Nomenklatur	Klasifikasi	Provinsi	Lokasi	Wilayah Kerja
82.	Loka POM di Kabupaten Mimika	Loka	Papua Tengah	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Puncak Jaya
83.	Loka POM di Kabupaten Merauke	Loka	Papua Selatan	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

TARUNA IKRAR